

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembangan pariwisata bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi masyarakat dan perusahaan swasta juga dapat turut serta. Ini menunjukkan jenis kerja sama yang bertujuan untuk mengatasi keterbatasan pemerintah dalam mengelola pemerintahan, terutama sektor pariwisata. Oleh karena itu, aktor-aktor kebijakan yang terlibat dalam pemerintahan kerjasama atau kolaboratif dapat secara konstruktif mengisi kekurangan dan kelebihan proses implementasi kebijakan.

Industri pariwisata Indonesia merupakan industri yang berperan penting dalam keberlangsungan perekonomian Indonesia. Jika pengelolaan yang baik dan benar tercapai, pengembangan pariwisata sebagai industri menciptakan peningkatan perputaran ekonomi melalui pengembangan transportasi, perumahan, dan konsumsi, yang menciptakan lapangan kerja relatif besar (Hadi & AlAsy Ari, 2017). Secara geografis, Indonesia merupakan negara dengan alam yang indah, sehingga memiliki peluang yang baik dalam pengembangan industri pariwisata (Rusyidi & Fedryansah, 2019).

Agrowisata adalah salah satu jenis perjalanan pedesaan yang menggunakan kegiatan pertanian sebagai daya tarik wisata dan melibatkan penduduk lokal dalam perencanaan dan pengelolaan lokasi. Menurut Jolly dan Reynolds dalam buku (Pengantar & Teori Destinasi Pariwisata, 2023), agrowisata adalah bisnis yang dilakukan oleh petani yang bekerja di sektor pertanian untuk menyenangkan dan mengajarkan pengunjung. Agrowisata meningkatkan pendapatan masyarakat dan potensi sumber pendapatan. Secara tidak langsung, pengunjung agrowisata dapat berhubungan langsung dengan petani dan mendukung peningkatan produk pertanian. Namun sejauh ini, pembangunan agrowisata masih dalam tahap pengembangan. Sedangkan untuk dapat dikatakan pembangunan tersebut optimal, pembangunan tersebut harus mengikutsertakan para pemangku kepentingan agar

mengelola potensi wilayah dengan baik, mengintegrasikan peran dan fungsi masing-masing untuk mengelola sumber daya yang dimiliki.

Sumber daya dapat berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, atau sumber daya penunjang seperti modal dan teknologi informasi. Di Indonesia, "agrowisata" adalah sejenis wisata pertanian atau agro yang dirancang sebagai sarana rekreasi yang berbasis pertanian dan untuk meningkatkan pengetahuan. Agrowisata hidup karena unik dan memiliki karakteristik unik yang tidak dimiliki oleh tempat wisata lainnya. Kearifan lokal dan aktivitas wisata yang memberikan pengalaman yang berkesan bagi wisatawan dapat menjadi ciri khas tersebut menurut Fatchiya dalam (Roels, 2020).

Agrowisatapun juga dapat berarti lahan pertanian yang dijadikan destinasi wisata. Tujuan pembangunan agrowisata adalah untuk meningkatkan kualitas hidup petani dan memungkinkan mereka memasarkan produk mereka dengan lebih banyak uang tunai. Menurut Dinas Pariwisata DIY (2013), kondisi alami yang ada di agrowisata dan edukasi pertanian dengan menonjolkan budaya lokal merupakan atraksi wisata. Sebagai model pertanian yang mengawinkan pariwisata dan pertanian, agrowisata masih dapat berkembang. Dua sektor yang sangat berbeda ini dapat bekerja sama untuk menciptakan perekonomian sambil mempertahankan keseimbangan dan menjaga kelestarian alam.

Parawisata yang dioptimalkan dapat membantu mengatasi masalah Perekonomian yang masih dihadapi oleh banyak negara berkembang dengan populasi yang besar, salah satunya Indonesia. Pengembangan pariwisata harus memenuhi keinginan wisatawan sehingga mereka puas dengan kunjungannya dan ingin kembali ke Indonesia lagi atau paling tidak, berbagi pengalaman mereka dengan orang lain. Bergantung pada lokasi, ketersediaan sumber daya alam (SDA), dan sumber daya manusia (SDM), dan berbagai konsep pengembangan pariwisata dapat diterapkan.

Pemerintah, swasta, masyarakat umum, akademisi, dan media adalah semua aktor yang terlibat didalam collaborative governance. Pemerintah

menetapkan peraturan, memantau, dan melibatkan pihak swasta untuk menilai pembangunan. Mereka juga mengintegrasikan program daerah dengan program pusat. Sangat penting untuk mengintegrasikan program di daerah dengan program di pusat karena tanpa integrasi, program yang dijalankan tidak akan memiliki acuan dan dasar. Hal ini juga dapat menghambat pemantauan dan pelaporan dari pemerintah daerah ke pusat.

Pembangunan kepariwisataan di era governance seperti saat ini, dibutuhkan komitmen pemerintah untuk tidak memilih berkompetisi dengan swasta maupun unsur NGO (Non Government Organization) lainnya melainkan memilih upaya kolaborasi dengan meningkatkan kerjasama antar stakeholder pariwisata. Berdasarkan perspektif inilah, pengelolaan pariwisata menjadi strategis dalam studi public administration, khususnya dalam konteks governance. Sebagaimana yang ditegaskan bahwa governance sebagai suatu konsep sekaligus teori dalam perkembangan ilmu administrasi publik menekankan pada prinsip kerja sama dalam pelaksanaan urusan dan pelayanan pemerintah yang dikembangkan oleh beberapa pakar dengan persyaratan collaborative governance dan partnership governance (dalam Zaenuri dkk, 2015, h. 6). Model governance, dengan konsep collaborative governance ini dianggap dapat dijadikan sebagai alternatif untuk melakukan akselerasi kebijakan publik Ansell & Gash dalam (Matthoriq, 2021) serta lebih mudah untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dan kemitraan diantara pilar governance.

Potensi agrowisata yang dimiliki desa Sirnajaya didukung dengan letak geografis Kecamatan Gunung Halu yang berada di dataran tinggi, dimana Desa merupakan suatu lahan yang dikelilingi pegunungan. Desa Sirnajaya termasuk dalam satuan wilayah pemasok petani kopi yang paling banyak dikarenakan banyaknya petani yang memproduksi kopi, serta didukungnya oleh letak tanah dan geografis. Petani kopi di desa ini.

Dasar hukum dari collaborative governance biasanya berasal dari berbagai peraturan hukum yang mengatur kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Di

Indonesia, dasar hukum untuk collaborative governance dapat ditemukan dalam berbagai undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di daerahnya. Selain itu, konsep-konsep yang mendukung collaborative governance juga terdapat dalam regulasi terkait tata kelola yang baik, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan.

Pada saat melakukan survei awal di Desa Sirnajaya banyaknya masyarakat yang menjadi petani kopi kurang lebih ada 200 orang. Hal ini yang menjadikan agrowisata kopi yang akan dibangun sedikit mengalami kendala dikarenakan masyarakat yang merasa tersaingi karena ditakutkan kopi yang mereka tanam dan jual akan kalah bersaing dengan agrowisata kopi yang akan dibangun. Padahal dengan adanya agrowisata yang dibuat bisa membuat petani kopi mengeksport kopi ke wilayah yang lebih jauh dan juga bisa berkolaborasi dengan pihak agrowisata untuk lebih mengembangkan, memajukan serta lebih membuat terkenal daerah tersebut.

Menurut Suhardi, kepala Desa Sirnajaya di Kecamatan Gununghalu, Kopi Gununghalu memiliki potensi besar untuk menjadikan wilayah selatan KBB ini sebagai destinasi wisata. Wisatawan masih belum menemukan sentra oleh-oleh atau agrowisata Kopi Gununghalu. Banyak wisatawan, terutama pecinta kopi, menghadapi kesulitan menemukan tempat yang tepat untuk menikmati kopi Gununghalu secara langsung. Saat ini, kebanyakan orang dapat memesan kopi secara online, tetapi jika ingin menikmatinya secara langsung, tidak ada tempat yang menarik bagi wisatawan.

Peluang yang tercipta membuat pihak swasta (PT.Coffe Cabin) yang ingin membuat agrowisata di Desa Sirnajaya. Mulai dilakukannya pembangunan agrowisata kopi pada bulan 2022 dan rencana berakhir pada tahun 2025. Sampai sekarang agrowisata kopi ini telah membangun kebun produksi dan villa yang memiliki luas 2894m² sudah beroperasi.

Salah satu peraturan yang bisa disebut sebagai upaya untuk mensejahterakan rakyat melalui collaborative governance adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Indonesia. Undang-undang ini memberikan landasan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan pola kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan sektor swasta, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, berbagai regulasi lain yang mengatur tata kelola yang baik, transparansi, partisipasi publik, dan pemberdayaan masyarakat juga menjadi dasar bagi praktik collaborative governance yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Misalnya, regulasi terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, dan sektor-sektor lain yang secara langsung atau tidak langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Penerapan collaborative governance yang baik diiringi dengan komitmen dan implementasi yang konsisten dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, dapat memberikan kontribusi positif dalam mencapai tujuan mensejahterakan rakyat.

Kolaborasi yang dilakukan di Desa Sirnajaya yaitu bertujuan untuk memajukan daerah tersebut dan agar Desa Sirnajaya lebih dikenal oleh masyarakat luas. Kolaborasi pihak desa dan pihak swasta yaitu pihak desa memasok kebutuhan kopi kepada pihak swasta hampir 50% dari koperasi unit Desa Sirnajaya. Pembagian hasil dari collaborative governance ini yaitu 40% untuk pihak swasta 30% untuk biaya operasional dan 30% untuk pihak desa.

Pembangunan Agrowisata di desa Sirnajaya tentunya harus bisa memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat setempat. Peneliti fokus terhadap dampak pengembangan agrowisata . Agrowisata memberikan banyak peluang terhadap masyarakat untuk ikut dalam pengelolaan agrowisata yang ada di dalamnya. Pengelolaan agrowisata dapat dilihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat, maka dari itu Peneliti ingin meneliti mengenal dampak pengembangan agrowisata di Desa Sirnajaya terhadap kesejahteraan perekonomian masyarakat lokal.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan, Peneliti mengidentifikasi terdapat beberapa masalah dalam pembangunan agrowisata kopi terhadap kesejahteraan perekonomian masyarakat Desa Sirnajaya Kecamatan Gunung Halu Kabupaten Bandung Barat, diantaranya :

- 1) Masih banyak masyarakat yang tidak mengerti apa itu agrowisata dan masyarakat banyak yang menolak agrowisata karena dirasa kurang menguntungkan bagi masyarakat sekitar.
- 2) Pemerintah Desa dan Swasta masih kurang efektif dalam pelaksanaan collaborative government.
- 3) Masyarakat yang merasa tersaingi dikarenakan agrowisata yang akan dibangun mengelola kopi dan sebagian masyarakat disana adalah petani kopi.
- 4) Masyarakat yang kurang bisa memanfaatkan dan mengeksport hasil dari pertanian kopi.

Dengan beberapa identifikasi masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Pengaruh Collaborative Governance Melalui Pembangunan Agrowisata terhadap Perekonomian Masyarakat Desa Sirnajaya Kabupaten Bandung Barat”***.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan indentifikasi masalah yang telah dipaparkan, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana implementasi *collaborative governance* dalam pembangunan agrowisata di Desa Sirnajaya Kabupaten Bandung Barat?
- 2) Bagaimana kondisi perekonomian masyarakat Desa Sirnajaya Kabupaten Bandung Barat?
- 3) Bagaimana pengaruh implementasi *collaborative governance* dalam pembangunan agrowisata terhadap perekonomian masyarakat Desa Sirnajaya Kabupaten Bandung Barat?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk menguji serta mengetahui apakah *governance collaborative* yang dilakukan antara pihak pemerintah Desa Sirnajaya dan swasta (PT. Coffe Cabin) untuk membangun agrowisata di Desa Sirnajaya mempengaruhi kesejahteraan masyarakat sekitar . Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui implementasi *collaborative governance* dalam pembangunan agrowisata kebun kopi di Desa Sirnajaya.
- 2) Untuk mengetahui kondisi perekonomian masyarakat di Desa Sirnajaya Kabupaten Bandung Barat.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh implementasi *collaborative governance* melalui pembangunan agrowisata terhadap perekonomian masyarakat Desa Sirnajaya Kabupaten Bandung Barat

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam ilmu pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.5.1 Manfaat secara Teoritis

Manfaat dari penelitian ini adalah dapat bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang administrasi Publik khususnya terkait dengan *Governance Collaborative* . Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk generasi masa yang akan datang serta dapat bermanfaat sebagai bahan perbandingan maupun referensi terhadap suatu penelitian.

1.5.2 Manfaat secara Praktis

- a) Bagi Pemerintah Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang *collaborative government* yang dilakukan di Desa Sirnajaya untuk Kesejahteraan Perekonomian Masyarakat, sehingga pemerintah termotivasi

untuk meningkatkan kualitas perekonomian khususnya di desa pada periode-periode berikutnya.

- b) Bagi Masyarakat Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara langsung kepada masyarakat mengenai pengaruh collaborative government melalui pembangunan agrowisata di Desa Sirnajaya terhadap kesejahteraan perekonomian masyarakat .
- c) Bagi Akademisi Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan menjadi acuan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Keuangan pada Prodi Administrasi Publik

1.6 Kerangka Pemikiran

Perlu adanya kolaborasi oleh para stakeholder untuk melakukan pembangunan agrowisata di desa Sirnajaya melalui program governance collaborative agar bisa mensejahterakan perekonomian dan memperoleh kepercayaan dari masyarakat di Desa Sirnajaya. Kolaborasi merupakan serangkaian proses yang dilakukan pihak-pihak terkait sebagai salah satu upaya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan agar tujuan yang telah direncanakan, mampu mencapai titik keberhasilannya.

Disini peneliti menggunakan teori collaborative governance untuk variabel independen (X) dari Ansell & Ghosh yang dimana terdiri dari 4 dimensi yaitu

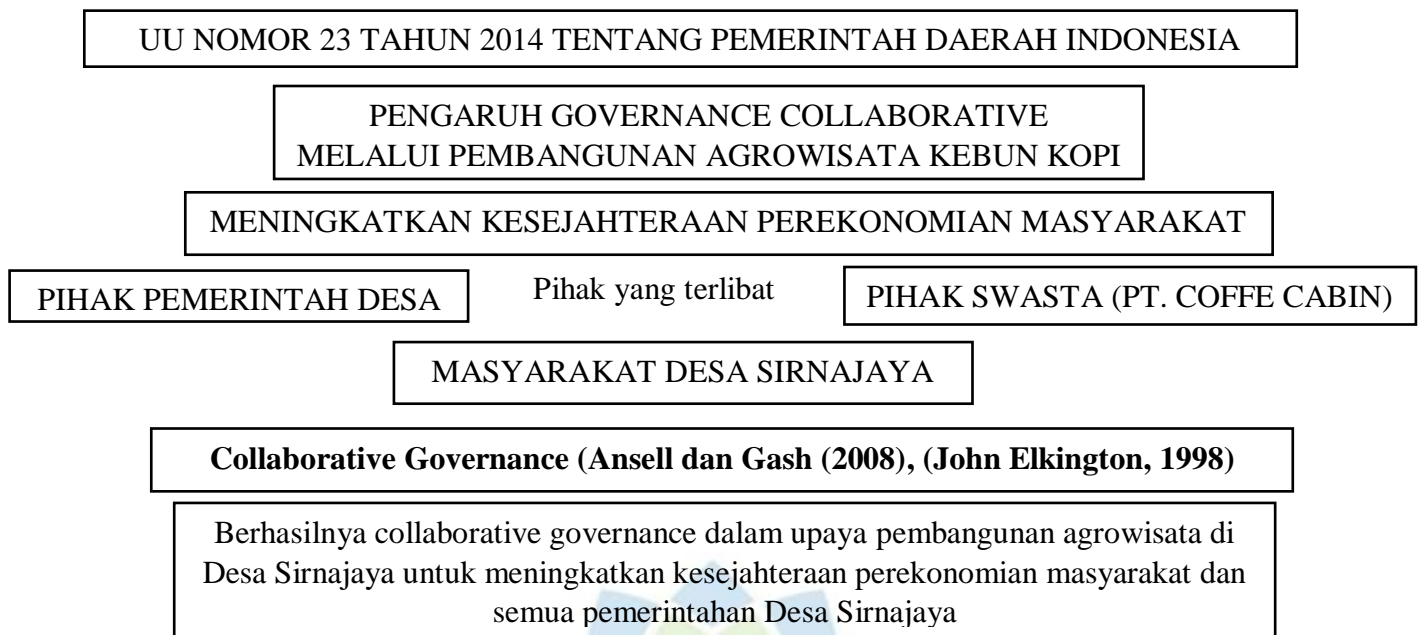
1. Kondisi Awal (starting condition) merujuk pada situasi dan konteks di mana proses kolaborasi dimulai. Ini mencakup berbagai faktor seperti masalah yang dihadapi, sejarah interaksi antara aktor-aktor yang terlibat, serta dinamika kekuasaan dan sumber daya yang tersedia.
2. Institutional design adalah bagaimana struktur dan aturan-aturan kolaborasi dirancang untuk memfasilitasi proses kerja sama. Ini termasuk bagaimana pertemuan diatur, peran dan tanggung jawab ditetapkan, dan bagaimana keputusan dibuat.
3. Kepemimpinan mengacu pada peran yang dimainkan oleh individu atau kelompok yang memimpin dan memfasilitasi proses kolaborasi. Kepemimpinan yang efektif dapat membantu menjaga fokus, memotivasi peserta, dan menyelesaikan konflik.

4. Proses Kolaborasi adalah tahap di mana interaksi antara aktor-aktor dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Ini mencakup komunikasi, negosiasi, dan pembentukan konsensus.

Keempat tahapan ini saling berkaitan dan berkontribusi terhadap keberhasilan proses collaborative governance. Dengan memahami dan menerapkan teori ini, berbagai pihak dapat lebih efektif dalam bekerja sama untuk menyelesaikan masalah publik dan mencapai tujuan bersama. Sementara untuk variabel dependen (Y) menggunakan teori Triple Bottom Line (John Elkington 1994). Elkington memperkenalkan konsep yang mengukur keberhasilan tidak hanya dari segi ekonomi, tetapi juga sosial dan lingkungan. Dalam agrowisata, ini berarti menilai dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari pengembangan agrowisata dan untuk dimensi teori ini meliputi :

1. Pengukuran Dampak Ekonomi, dimensi Ini merujuk pada aspek finansial dari agrowisata, seperti profitabilitas, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi lokal.
2. Dampak Sosial yaitu mencakup efek agrowisata terhadap masyarakat, termasuk kesejahteraan sosial, pengaruh budaya, dan kualitas hidup.
3. Dampak Lingkungan mencakup efek agrowisata terhadap lingkungan alami, termasuk penggunaan sumber daya alam dan dampak terhadap ekosistem.

Sehingga, teori-teori tersebutlah yang akan menjadi tahapan acuan peneliti untuk memecahkan permasalahan yang terjadi. Sebab, peneliti melihat bahwa belum jelasnya stakeholder yang ikut terlibat di dalam kolaborasi tersebut. Selain itu, belum terbentuknya kelompok kerja, tidak dibentuknya aturan dasar atas kolaborasi tersebut, serta belum adanya titik kejelasan terkait sudah sejauh hasil dari kolaborasi tersebut. Sehingga, dengan adanya teori tersebut, diharapkan mampu menjadi solusi atas permasalahan yang terjadi di Desa Sirnajaya agar desa tersebut bisa mensejahterakan perekonomian masyarakat melalui program governance collaborative melalui pembangunan agrowisata. Peneliti merumuskan secara lebih sederhana dalam model penelitian sebagai berikut :



Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran

1.7 Hipotesis

Atas dasar pertimbangan di dalam rumusan masalah, maka hipotesis yang Peneliti kemukakan adalah :

1. H_0 Tidak terdapat pengaruh *collaborative governance* melalui pembangunan agrowisata terhadap perekonomian masyarakat Desa Sirnajaya Kabupaten Bandung Barat.
- H_1 Terdapat pengaruh *collaborative governance* melalui pembangunan agrowisata terhadap perekonomian masyarakat Desa Sirnajaya Kabupaten Bandung Barat.

1.8 Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, penelitian sebelumnya harus ditemukan. Ini akan memberikan dukungan yang kuat karena merujuk pada penelitian yang sama dan dekat dengan yang dilakukan peneliti. Di antara beberapa penelitian yang dianggap relevan oleh peneliti adalah;

Tabel 1.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Keterkaitan	Kebaruan (Novelty)
1	Natasya (2022)	Pengembangan Potensi Objek Wisata Pasar Van Der Capellen Berdasarkan Perspektif Collaborative Governance	kedua penelitian sama-sama mengadopsi perspektif governance collaborative, yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder lainnya dalam pengembangan objek wisata. Dalam konteks Natasya, kolaborasi ini terwujud dalam pengelolaan Pasar Van Der Capellen, sementara dalam skripsi ini, fokusnya beralih ke agrowisata di Desa Sirnajaya. Natasya menunjukkan bahwa keterlibatan berbagai pihak dalam pengembangan objek wisata dapat mengurangi konflik dan meningkatkan dukungan, yang juga menjadi perhatian dalam penelitian ini. Skripsi ini akan menginvestigasi apakah model governance collaborative yang sama dapat diterapkan dalam konteks agrowisata, serta dampaknya	novelty dengan fokus pada agrowisata sebagai alternatif pengembangan ekonomi berbasis pertanian, berbeda dari penelitian Natasya (2022) yang berfokus pada objek wisata umum. Penelitian ini akan menganalisis dampak ekonomi secara langsung terhadap masyarakat, termasuk peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja, serta menyajikan model collaborative governance yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan studi kasus spesifik di Desa Sirnajaya, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan

			terhadap perekonomian masyarakat setempat.	dan praktik terbaik dalam pengembangan agrowisata.
2	Aninda & Dyah (2021),	Pengaruh Governance Collaborative melalui Pembangunan Agrowisata terhadap Perekonomian Masyarakat Desa Sirnajaya Kabupaten Bandung Barat	Fokus keduanya terhadap governance collaborative dalam pengembangan destinasi wisata. Sementara Aninda & Dyah meneliti desa wisata Kemetul, skripsi ini beralih ke agrowisata, dengan mengidentifikasi kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder lainnya sebagai kunci keberhasilan. Penelitian Aninda & Dyah mencatat kendala seperti kurangnya kejelasan aturan dan komitmen, yang juga akan dianalisis dalam konteks Desa Sirnajaya. Meskipun Aninda & Dyah menggunakan pendekatan kualitatif, skripsi ini akan menerapkan pendekatan kuantitatif untuk mengukur dampak langsung kolaborasi terhadap perekonomian masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan	novelty yang signifikan. Pertama, fokus penelitian ini beralih dari pengembangan desa wisata, seperti pada penelitian Aninda & Dyah (2021), ke agrowisata, yang lebih relevan dengan konteks pertanian dan keberlanjutan ekonomi lokal. Kedua, penelitian ini tidak hanya akan menganalisis implementasi governance collaborative, tetapi juga dampaknya terhadap perekonomian masyarakat, termasuk pendapatan dan kesempatan kerja. Ketiga, pendekatan metodologi yang digunakan adalah kuantitatif, dengan pengumpulan data melalui survei, memberikan perspektif yang berbeda dalam pengukuran efektivitas kolaborasi antar stakeholder. Keempat,

			<p>baru mengenai pengaruh governance collaborative dalam konteks agrowisata.</p>	<p>penelitian ini akan mengeksplorasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan governance collaborative. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan agrowisata dan perekonomian desa di Indonesia.</p>
3	Matthoriq & Zauhar (2021)	<p>Pengaruh Governance Collaborative melalui Pembangunan Agrowisata terhadap Perekonomian Masyarakat Desa Sirnajaya Kabupaten Bandung Barat</p>	<p>Keduanya menekankan pentingnya komunikasi dan kerja sama, tetapi skripsi ini akan mengeksplorasi dampak ekonomi secara langsung, termasuk peningkatan pendapatan dan lapangan kerja. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini memberikan data terukur yang melengkapi analisis kualitatif yang dilakukan oleh Matthoriq & Zauhar, sehingga memperluas pemahaman tentang bagaimana kolaborasi dapat mempengaruhi keberhasilan</p>	<p>Fokus penelitian ini akan lebih spesifik pada agrowisata, menggantikan konteks pariwisata desa yang lebih umum, sehingga relevan dengan potensi pertanian lokal. Kedua, penelitian ini tidak hanya menganalisis dinamika kolaborasi antar stakeholder, tetapi juga mengukur dampaknya secara langsung terhadap perekonomian masyarakat, termasuk aspek peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan</p>

			<p>pengembangan agrowisata dan kesejahteraan masyarakat desa.</p>	<p>kerja. Ketiga, pendekatan metodologi yang digunakan adalah kuantitatif, melalui survei untuk mengumpulkan data, yang memungkinkan analisis statistik untuk mengevaluasi pengaruh governance collaborative secara lebih sistematis. Keempat, penelitian ini akan menggali lebih dalam mengenai tantangan yang dihadapi dalam implementasi kolaborasi, serta memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan efektivitas governance dalam konteks agrowisata. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam pengembangan agrowisata dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat desa.</p>
--	--	--	---	---



- 1) Penelitian Natasya (2022) yang Pengembangan Potensi Objek Wisata Pasar Van Der Capellen Berdasarkan Perspektif Collaborative Governance,

pendekatan kualitatif, Pengumpulan data digunakan instrumen penelitian berupa observasi ke lapangan dan dilakukan kemudian studi dokumentasi digunakan untuk dokumen dalam penelitian. analisis data dilakukan menggunakan cara Manual Data Analysis Prosedur (MDAP). Hasil penelitian ini menunjukan wisata Pasar Van Der Capellen yang dikelola langsung oleh GenPi dan pihak yang terlibat dalam pengembangan Pasar Van Der Capellen yaitu Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga serta masyarakat. Keterlibatan para pihak ini sejalan dengan pengembangan yang akan dilakukan pada objek wisata Pasar Van Der Capellen. dimana untuk pembagian peran, kriteria dan tugas masing-masing pihak melaksanakan peran berdasarkan bidang masing-masing. Untuk konflik tidak ada terjadi karena pemerintah dan masyarakat mendukung untuk Pasar Van Der Capellen menjadi objek wisata. perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabelnya dan juga terletak pada jumlah instrumen dan populasi, sampel, dan lokasi penelitian.

- 2) Penelitian Aninda & Dyah (2021) yang berjudul Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata Kemetul, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian korelasi dengan pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara dan dokumentasi, kemudian data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan metode analisis interaktif. Hasil penelitian yang menunjukkan Collaborative governance dalam pengembangan Desa Wisata Kemetul dilihat melalui model collaborative governance Ansel dan Gash masih belum terlaksana secara maksimal. Dalam pelaksanaannya musyawarah merupakan cara dalam berkomunikasi antar stakeholders dimana kolaborasi dan ini dipimpin oleh kepala desa, sedangkan pokdarwis dan dispar membantu dalam pemberdayaan. Namun masih terdapat kendala pada kurangnya kejelasan aturan, pemahaman bersama dan komitmen para stakeholders.. perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada variabel yang mempengaruhinya yaitu Pengembangan , perbedaan juga terletak pada jumlah instrumen, populasi, sampel, tempat penelitian.

- 3) Penelitian Matthoriq & Zauhar (2021) yang Collaborative Governance dalam Tata Kelola Pariwisata-Desa (Studi PariwisataDesa “Bumiaji Agrotourism” di Kota Wisata Batu) . Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara secara mendalam terhadap stakeholders pariwisata desa pada wilayah kecamatan Bumiaji; observasi partisipan dan non partisipan; dan studi dokumentasi. Penelitian ini tidak menguraikan karakter dan profil destinasi wisata desa dan fasilitas pendukungnya. Dikarenakan penelitian ini lebih memfokuskan pada dinamika kolaborasi antar stakeholders pariwisata desa baik bersadar kajian teoritis maupun empiris terdahulu . Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah variabelnya, dimana dalam variabel bebas membahas tata kelola pariwisata dan variabel terikat, juga terletak pada jumlah instrumen, populasi, sampel, tempat penelitian, serta fokus permasalahan yang dikaji.

